

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pemberian ganti kerugian dan tahap yang terjadi pada pengadaan tanah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, responden puas dengan pemberian ganti kerugian yang telah diberikan oleh pemerintah, karena penggantian kerugian yang diberikan merupakan adalah ganti kerugian yaitu bahkan 2 kali lipat dari harga normal yang terjadi di Kelurahan Purwomartani sehingga tidak timbul konflik antara pihak.

B. Saran

Dalam menentukan nilai ganti kerugian yang terjadi di Kelurahan Purwomartani, pemilik tanah yang diundang mengikuti musyawarah, harus ada dialog tentang besaran ganti kerugian yang telah dinilai oleh Tim Penilai, pemilik tanah tidak hanya mendengarkan dan langsung diberikan nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdurrahman., 1996, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan, dan pengadaan Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aminuddin Sale., 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Andy Hartanto, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Andrian Sutedi., 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Edisi 1, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono., 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan penjelasan.* (Edisi Revisi), Universitas Trisakti, Jakarta.
- Djoni Sumardi Gozali, 2017, *Hukum Pengadaan Tanah – Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Elza Syarif., 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta.
- John Salindeho., 1987, *Masalah Tanah Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan 2 Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Sumardjono S.W., 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*”, Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- , 1982. *Departemen Penerangan Republik Indonesia*, Kompas Media Nusantara. Jakarta.

INTERNET

Kementrian Keuangan. 2021. "Pemerintah siapkan anggaran infrastruktur 417 triliun untuk tahun 2021". (www.kemenkeu.go.id, accessed on March 23, 2021)

JURNAL/MAKALAH

Rahayu Subekti, 2016, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum". Yustisia.Vol. 5 No 2, ed 383, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Imam Koeswono, 2008, "Melacak Dasar Konstitusi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum" Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2009 – 2029

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031.

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta

